



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/318/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
PERIODE TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, perlu dilakukan evaluasi kinerja keuangan Perangkat Daerah melalui pengukuran indikator kinerja keuangan Perangkat Daerah pada periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan keputusan rapat Tim Penilai telah ditentukan hasil akhir penilaian Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 30 Juli 2025, perlu menetapkan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Kategori I, meliputi:
 1. Dinas;
 2. Badan;
 3. Inspektorat;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 5. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Kategori II, meliputi Kecamatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Agustus 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/IF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 318 /2025
TANGGAL 4 Agustus 2025

DAFTAR HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG PERIODE TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

KATEGORI I

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
				DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)						
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	80,21	50,73	100,00	100,00	97,73	78,46	100%	0,00	78,46	1	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	16,04	17,75	15,00	15,00	14,66						
		Nilai Aspek	80,21	87,12									
2.	Dinas Sosial	Nilai	84,38	71,22	60,00	100,00	0,00	65,80	85%	0,00	77,42	2	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	0%						
		Nilai Akhir	16,88	24,93	9,00	15,00	0,00						
		Nilai Aspek	84,38	77,07									
3.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai	78,55	42,82	100,00	100,00	79,27	72,59	100%	0,00	72,59	3	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	15,71	14,99	15,00	15,00	11,89						
		Nilai Aspek	78,55	80,52									

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
				DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)						
4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai	79,77	55,60	0,00	0,00	99,86	50,40	70%	0,00	71,99	4	Cukup
		Bobot	20%	35%	0%	0%	15%						
		Nilai Akhir	15,95	19,46	0,00	0,00	14,98						
		Nilai Aspek	79,77	77,73									
5.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Nilai	79,07	43,54	94,00	83,33	74,57	68,84	100%	0,00	68,84	5	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	15,81	15,24	14,10	12,50	11,19						
		Nilai Aspek	79,07	73,86									
6.	Dinas Tenaga Kerja	Nilai	79,87	52,56	85,00	64,29	80,00	68,76	100%	0,00	68,76	6	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	15,97	18,40	12,75	9,64	12,00						
		Nilai Aspek	79,87	70,46									
7.	Dinas Kesehatan	Nilai	79,88	55,64	74,40	60,00	83,33	68,11	100%	0,00	68,11	7	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	15,98	19,48	11,16	9,00	12,50						
		Nilai Aspek	79,88	68,34									

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
				DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)						
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai	80,79	59,14	55,00	0,00	78,95	56,95	85%	0,00	67,00	8	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	0%	15%						
		Nilai Akhir	16,16	20,70	8,25	0,00	11,84						
		Nilai Aspek	80,79	64,36									
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	79,11	52,50	0,00	0,00	83,19	46,68	70%	0,00	66,68	9	Kurang
		Bobot	20%	35%	0%	0%	15%						
		Nilai Akhir	15,82	18,38	0,00	0,00	12,48						
		Nilai Aspek	79,11	67,85									
10.	Rumah Sakit H. Badrudin Kasim	Nilai	80,82	58,13	0,00	0,00	0,00	36,51	55%	0,00	66,38	10	Kurang
		Bobot	20%	15%	0%	0%	0%						
		Nilai Akhir	16,16	20,35	0,00	0,00	0,00						
		Nilai Aspek	80,82	58,13									
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai	80,11	54,61	0,00	0,00	75,00	46,39	70%	0,00	66,27	11	Kurang
		Bobot	20%	15%	0%	0%	15%						
		Nilai Akhir	16,02	19,11	0,00	0,00	11,25						
		Nilai Aspek	80,11	64,81									

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
12.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai	72,21	28,15	98,89	100,00	66,58	63,81	100%	0,00	63,81	12	Kurang
	Bobot	20%	35%	15%	15%	15%							
	Nilai Akhir	14,44	9,85	14,53	15,00	9,99							
	Nilai Aspek	72,21	72,90										
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai	83,81	64,30	38,00	60,00	66,67	63,67	100%	0,00	63,67	13	Kurang
	Bobot	20%	35%	15%	15%	15%							
	Nilai Akhir	16,76	22,51	5,40	9,00	10,00							
	Nilai Aspek	83,81	56,74										
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	86,00	53,82	66,00	50,00	68,67	63,44	100%	0,00	63,44	14	Kurang
	Bobot	20%	35%	15%	15%	15%							
	Nilai Akhir	17,20	18,84	9,90	7,50	10,00							
	Nilai Aspek	86,00	59,12										
15.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Nilai	80,82	52,40	20,00	0,00	99,03	52,36	85%	0,00	61,60	15	Kurang
	Bobot	20%	35%	15%	0%	15%							
	Nilai Akhir	16,16	18,34	3,00	0,00	14,85							
	Nilai Aspek	80,82	57,14										
16.	Inspektorat	Nilai	78,63	51,18	0,00	0,00	0,00	33,64	55%	0,00	61,16	16	Kurang
	Bobot	20%	35%	0%	0%	0%							
	Nilai Akhir	15,73	17,91	0,00	0,00	0,00							
	Nilai Aspek	78,63	51,18										

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
				DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)						
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	82,49	56,30	0,00	0,00	44,02	42,81	70%	0,00	61,15	17	Kurang
		Bobot	20%	35%	0%	0%	15%						
		Nilai Akhir	16,50	19,70	0,00	0,00	6,60						
		Nilai Aspek	82,49	50,16									
18.	Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	81,88	49,32	50,00	25,00	98,94	60,63	100%	0,00	60,63	18	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	16,38	17,26	8,40	3,75	14,84						
		Nilai Aspek	81,88	57,32									
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Nilai	75,77	40,08	61,60	40,00	98,33	59,17	100%	0,00	59,17	19	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	15,15	14,03	9,24	6,00	14,75						
		Nilai Aspek	75,77	60,00									
20.	Sekretariat Daerah	Nilai	83,54	56,38	17,50	26,67	99,60	58,01	100%	0,00	58,01	20	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	16,71	19,73	2,63	4,00	14,94						
		Nilai Aspek	83,54	50,04									
21.	Sekretariat DPRD	Nilai	77,33	45,08	0,00	0,00	0,00	31,24	55%	0,00	56,81	21	Kurang
		Bobot	20%	35%	0%	0%	0%						
		Nilai Akhir	15,47	15,78	0,00	0,00	0,00						
		Nilai Aspek	77,33	45,08									

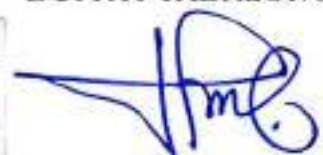
No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
				DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)						
22.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai	78,43	49,07	60,41	35,29	0,00	47,21	85%	0,00	55,55	22	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	0%						
		Nilai Akhir	15,69	17,17	9,06	5,29	0,00						
		Nilai Aspek	78,43	48,26									
23.	Dinas Perhubungan	Nilai	73,79	31,89	64,71	0,00	75,00	46,88	85%	0,00	55,15	23	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	0%	15%						
		Nilai Akhir	14,76	11,16	9,71	0,00	11,25						
		Nilai Aspek	73,79	57,20									
24.	Badan Pendapatan Daerah	Nilai	77,42	40,23	0,00	0,00	0,00	29,56	55%	0,00	53,75	24	Kurang
		Bobot	20%	35%	0%	0%	0%						
		Nilai Akhir	15,48	14,08	0,00	0,00	0,00						
		Nilai Aspek	77,42	40,23									
25.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai	76,19	39,35	72,00	50,00	25,00	51,06	100%	0,00	51,06	25	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	15,24	13,77	10,80	7,50	3,75						
		Nilai Aspek	76,19	46,59									
26.	Dinas Perkebunan dan Perikanan	Nilai	72,89	30,64	49,23	15,38	98,84	49,82	100%	0,00	49,82	26	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	14,58	10,72	7,38	2,31	14,83						
		Nilai Aspek	72,89	48,52									

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGLOLAAN UP/GU (15%)						
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	75,03	26,55	36,00	60,00	62,86	48,13	100%	0,00	48,13	27	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	15,01	9,29	5,40	9,00	9,43						
		Nilai Aspek	75,03	46,35									
28.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai	70,16	21,84	65,91	43,18	0,00	38,04	85%	0,00	44,75	28	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	14,03	7,64	9,89	6,48	0,00						
		Nilai Aspek	70,16	43,64									

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBAG/KASUBAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 318 /2025
 TANGGAL 9 Agustus 2025

DAFTAR HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG PERIODE TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

KATEGORI II


No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
				DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)						
1.	Kecamatan Kelua	Nilai	87,53	77,52	96,00	100,00	100,00	89,04	100%	0,00	89,04	1	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	17,51	27,13	14,40	15,00	15,00						
		Nilai Aspek	87,53	93,38									
2.	Kecamatan Jaro	Nilai	87,02	84,59	0,00	0,00	74,15	58,14	70%	0,00	83,05	2	Cukup
		Bobot	20%	35%	0%	0%	15%						
		Nilai Akhir	17,40	29,61	0,00	0,00	11,12						
		Nilai Aspek	87,02	79,37									
3.	Kecamatan Muara Hrus	Nilai	83,54	72,62	0,00	0,00	100,00	57,12	70%	0,00	81,61	3	Cukup
		Bobot	20%	35%	0%	0%	15%						
		Nilai Akhir	16,71	25,42	0,00	0,00	15,00						
		Nilai Aspek	83,54	86,31									

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
4.	Kecamatan Harau	Nilai	85,66	77,38	0,00	0,00	75,00	55,47	70%	0,00	79,24	4	Cukup
		Bobot	20%	35%	0%	0%	15%						
		Nilai Akhir	17,13	27,08	0,00	0,00	11,25						
		Nilai Aspek	85,66	76,19									
5.	Kecamatan Bintang Ara	Nilai	84,36	76,80	0,00	0,00	66,67	53,75	70%	0,00	76,79	5	Cukup
		Bobot	20%	35%	0%	0%	15%						
		Nilai Akhir	16,87	26,88	0,00	0,00	10,00						
		Nilai Aspek	84,36	71,73									
6.	Kecamatan Barua Lawas	Nilai	82,65	67,92	0,00	0,00	0,00	40,30	55%	0,00	73,28	6	Cukup
		Bobot	20%	35%	0%	0%	0%						
		Nilai Akhir	16,53	23,77	0,00	0,00	0,00						
		Nilai Aspek	82,65	67,92									
7.	Kecamatan Tania	Nilai	82,68	68,74	40,00	0,00	100,00	61,60	85%	0,00	72,47	7	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	0%	15%						
		Nilai Akhir	16,54	24,06	6,00	0,00	15,00						
		Nilai Aspek	82,68	69,58									
8.	Kecamatan Muara Uja	Nilai	84,85	64,72	76,00	60,00	80,00	72,02	100%	0,00	72,02	8	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	16,97	22,65	11,40	9,00	12,00						
		Nilai Aspek	84,85	70,18									

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
9.	Kecamatan Pugaan	Nilai	81,83	62,94	0,00	0,00	0,00	38,40	55%	0,00	69,81	9	Kurang
		Bobot	20%	35%	0%	0%	0%						
		Nilai Akhir	16,37	22,03	0,00	0,00	0,00						
		Nilai Aspek	81,83	62,94									
10.	Kecamatan Upau	Nilai	78,42	51,47	0,00	0,00	100,00	48,70	70%	0,00	69,57	10	Kurang
		Bobot	20%	35%	0%	0%	15%						
		Nilai Akhir	15,68	18,02	0,00	0,00	15,00						
		Nilai Aspek	78,42	75,74									
11.	Kecamatan Tarjung	Nilai	79,54	49,59	0,00	0,00	99,51	48,19	70%	0,00	68,84	11	Kurang
		Bobot	20%	35%	0%	0%	15%						
		Nilai Akhir	15,91	17,36	0,00	0,00	14,93						
		Nilai Aspek	79,54	74,55									
12.	Kecamatan Murung Pudak	Nilai	79,69	52,29	52,00	40,00	73,05	59,00	100%	0,00	59,00	12	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	15,94	18,30	7,80	6,00	10,96						
		Nilai Aspek	79,69	54,34									

BUPATI TABALONG,

PARAF MENYAKSI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABUPATEN TABALONG	
KORIDOR 1	
KORIDOR 2	

PARAF PENGUNCI	
SEKDA	
LISTEN	
KORIDOR 1	
KORIDOR 2	



MUHAMMAD NOOR RIFANI